

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Buku Alokasi Risiko PII, 2019

Chandawulan, An an, 2016, *Hukum Perusahaan Multinasional*, Keni Media, Bandung.

Irfan Nur Rachman, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian
Konstitusi Undang-Undang Sumber Daya Air, Jakarta, 2009

Leslie Siregar dan Stephanie Saterfield, 2010, *How Do You Like Your Infrastructure:
Public or Private*, SMPS Foundation White Paper, Leeds.

Maria SW. Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta.

Mansoor Dailami and Michael Klein, *Government Support To Private Infrastructure
Projects In Emerging Markets*, the world bank, 1868

M.J Esman dan N.T Uphoff, *Local Organization, Intermediaries Rural
Development*, London, Cornel University Press, 1990

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. Rajawali Pers. Jakarta.

VW Ruttan & Y Hayami, *Toward a Theory of Induced Institutional
Innovation*, 1984

W. Blomquist & E Ostrom, *Institutional Capacity and the Resolution of A
Commons Dilemma*, 1985

Yusid Toyib dan Riant Nugroho, Transformasi Public Private Partnership

Indonesia, Urgensi PPP dalam Penyediaan Infrastruktur di Indonesia

(Studi Kasus Infrastruktur di Bidang PUPR), PT Elex Media

Kompeterindo, Jakarta, 2018

Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur PII, 2012

2. Jurnal

Tata Wijayanta, Asas kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya

dengan Putusan Pengadilan Niaga, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 2014

Indonesia *Infrastructure Guarantee Fund, Public Private Partnership in Indonesia:*

Guarantee Provision Guideline

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on*

Economic, Social, and Cultural Rights (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4557)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679) .

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6405).Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun/2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4971)

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)

Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha

Penjaminan Infrastruktur

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 62)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan

Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah

Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian

Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama

Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360).

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Dukungan Pemerintah dalam Kerjasama bidang Penyediaan Air Minum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan

Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400).

Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Sumber Daya Air

4. Media Internet

Suara “ada 334 juta penduduk Indonesia kekurangan air bersih”,
<https://www.suara.com/health/2018/11/23/162639/ada-334-juta-penduduk-indonesia-kekurangan-air-bersih>.

Republika, “Kebutuhan Investasi Infrastruktur di atas rp 5000 triliun”,
<https://nasional.republika.co.id/berita/pyqrkh370/kebutuhan-investasi-infrastruktur-di-atas-rp-5000-triliun>,

5. Lain-Lain

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

Presentasi PT PII Sharing Session DPRD Gorontalo Tanggal 22 Juni 2018